

SIARAN PERS

BAWASLU, KPU, KI, DAN KPID LAMPUNG BENTUK GUGUS TUGAS PENGAWASAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA PADA PILKADA 2024

BANDAR LAMPUNG—Dalam upaya menciptakan kontestasi politik yang adil, tertib, dan bermartabat, Bawaslu Provinsi Lampung bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung, dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye. Penandatanganan tersebut berlangsung di Lampung pada Minggu (10/11).

Gugus tugas ini dibentuk untuk mengawasi pemberitaan di media cetak, penyiaran, serta digital selama tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serentak 2024. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menekankan pentingnya peran media dalam menjaga integritas demokrasi.

“Media adalah pondasi rumah demokrasi. Demokrasi yang kuat membutuhkan media yang berintegritas, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada,” ujar Iskardo. Ia juga menambahkan bahwa pengawasan terhadap media bertujuan memastikan semua pihak mematuhi regulasi yang berlaku demi mencegah pelanggaran selama masa kampanye.

Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, turut mengapresiasi pembentukan gugus tugas ini. Menurutnya, sinergi antara lembaga akan mendukung kelancaran pelaksanaan kampanye hingga hari pemilihan pada 27 November mendatang.

“Pemasangan iklan kampanye dimulai hari ini dengan desain yang sudah disetujui oleh pasangan calon. Kami berharap seluruh media dapat mendukung keberhasilan

kampanye ini secara tertib," jelas Erwan. Ia juga menyampaikan bahwa persiapan logistik pemilu terus dilakukan dengan memperhatikan kondisi geografis dan cuaca di Lampung.

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung, Erizal, menekankan pentingnya transparansi dalam proses demokrasi. "Tidak ada demokrasi tanpa transparansi. KI akan memastikan keterbukaan informasi agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengawasan Pilkada," ungkapnya. Ia berharap semua pihak memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku demi mewujudkan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur, dan adil (jurdil).

Wakil Ketua KPID Provinsi Lampung, Wirdayati, menyoroti peran media penyiaran dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. "KPID mengawasi iklan kampanye di TV dan radio, mulai dari sebelum hingga sesudah masa kampanye," ujarnya. Wirdayati menambahkan bahwa KPID telah bekerja sama dengan 107 lembaga penyiaran di Lampung, termasuk 30 TV lokal dan 76 radio, dalam menyampaikan informasi Pilkada secara bertanggung jawab.

Ahmad Qohar, Koordinator Divisi Humas dan Datin Bawaslu Lampung, menjelaskan bahwa gugus tugas ini berfokus pada pencegahan dan pengawasan pelanggaran. "Kami akan melakukan koordinasi antar lembaga untuk konsolidasi data dan informasi terkait pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Selain itu, kami juga mengidentifikasi potensi kerawanan, melakukan sosialisasi, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan," kata Qohar.

Ia menegaskan bahwa gugus tugas ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga keberlangsungan Pilkada yang bebas dari pelanggaran, transparan, dan demokratis.

Pembentukan Gugus Tugas ini menjadi salah satu langkah konkret dalam memastikan media di Lampung memainkan peran positif dalam menyukseskan Pilkada serentak 2024. Sinergi antar lembaga diharapkan dapat menciptakan suasana kompetisi politik yang damai dan penuh integritas.

**KETUA BAWASLU PROVINSI
LAMPUNG**

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung

Narahubung Pencegahan pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2024

Nama : Hamid Badrul Munir, S.Hi.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Kordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011